FOLLBACK DAKWAH
Joko Prasetyo
Gejala PKI
Bangkit Lagi,
Bermunculan
Pasca Reformasi
(10 Kisah Ngeri Kebiadaban Kaum Kiri di NKRI)

Joko Prasetyo

Gejala PKI Bangkit Lagi, Bermunculan *Pasca* Reformasi

(10 Kisah Ngeri Kebiadaban Kaum Kiri di NKRI)

Judul : GEJALA PKI BANGKIT LAGI, BERMUNCULAN PASCA REFORMASI
(10 Kisah Ngeri Kebiadaban Kaum Kiri di NKRI)
Penulis : Joko Prasetyo
Desain & layout : Tim Follback Dakwah 2019

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Seperti sudah menjadi konvensi, setiap September rekam jejak kebiadaban PKI kembali mengopini. Sebagai bahaya laten, kaum kiri memang wajib diwaspadai karena sudah berulang kali terbukti membantai kaum Muslimin di negeri ini. Untuk menyemarakkannya, penulis pun mengkliping *feature*, artikel, berita dan wawancara ke dalam buku digital ini.

Selain karunia dari Allah SWT, tentu saja terbitnya buku digital ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama penerbit *Follback Dakwah.*

Saran dan kritik yang membangun juga penulis nantikan untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya. Insya Allah.

Jazakumullah khairan katsiraa kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terbit dan tersebarnya buku digital ini. Semoga menjadi amal jariah kita bersama. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Depok, 13 Muharram 1441 H/13 September 2019

Penulis,

Joko Prasetyo

Daftar Isi

Ulama dan Santri jadi Syuhada Kekejaman PKI [1948]

Sedikitnya ada sekitar 114 ulama, santri dan juga aparat setempat diculik, disiksa lalu diseret dan jebloskan ke dalam beberapa sumur tua yang ada di tengah perkebunan tebu di Magetan.

Wajah buruk cermin dibelah. Tak puas membelah, para ulama dan santri pun diberi tulah. Begitulah pepatah baru untuk menggambarkan betapa nistanya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang diabadikan dalam sejarah.

Pembelahan cermin atau pemberontakan, diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Sjarifuddin Harahap (murtadin yang masuk Kristen pada 1931) karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville yang difasilitasi negara kapitalis Amerika. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut.

Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Munawar Muso (Paul Musotte/Muso) ---seorang tokoh komunis yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) dan baru kembali ke Indonesia pada 11 Agustus 1948--- ini menjelaskan tentang "pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik" dan menawarkan gagasan yang disebutnya "Jalan Baru untuk Republik Indonesia".

Muso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".

Selanjutnya, Muso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Muso juga menyerukan

kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade negara kapitalis Belanda.

--- Ia yang jadi pemimpin pergerakan komunis sejak 1920 di Batavia (sekarang Jakarta) pernah memimpin pemberontakan terhadap kapitalis Belanda di Batavia pada Nopember 1926 namun dengan mudah berhasil dipatahkan oleh kapitalis Belanda. Setelah keluar penjara Muso pun pindah ke Rusia---.

Untuk menyebarkan faham sesatnya, PKI berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Magetan, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, Wonosobo, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Blora, Pati, dan Kudus.

Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Tujuannya untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia dan menjadikan Dungus Madiun sebagai ibu kota, Muso presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya.

Namun tentu saja paham komunis dan sosialis yang terpancar dari akidah ateis mendapat penentangan keras dari para ulama dan santri yang istiqamah dengan akidah tauhid dan syariat Islamnya.

Ulama Diberi Tulah

Meski ulama dan santri tidak bersalah, justru tindakan mereka untuk menyadarkan umat akan kekufuran ideologi komunis adalah kebenaran yang memang wajib disampaikan,

PKI pun berupaya menulahi dengan meneror, menculik dan membunuhi para ulama, santri dan juga para aparat yang dilakukan secara serentak pada September 1948.

Sedikitnya ada sekitar 114 ulama, santri dan juga aparat setempat diculik, disiksa lalu diseret dan jebloskan ke dalam beberapa sumur tua yang ada di tengah perkebunan tebu di Magetan, kabupaten yang berbatasan dengan Madiun. Mereka diantar ke lokasi eksekusi dengan cara diangkut dengan gerbong lori yang biasa digunakan untuk mengangkut tebu.

Para ulama yang, insya Allah, syahid di antaranya adalah KH Imam Shofwan. Pengasuh Pesantren Thoriqussu'ada Rejosari, Madiun. KH Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan, ketika dimasukkan ke dalam sumur, KH Imam Shofwan sempat mengumandangkan azan. Dua putra KH Imam Shofwan, yakni Kiai Zubeir dan Kiai Bawani, juga menjadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.

Selain itu, beberapa syuhada lainnya ---insya Allah-- adalah keluarga Pesantren Sabilil Mutaqin (PSM) Takeran. Mereka adalah guru Hadi Addaba' dan Imam Faham dari Pesantren Sabilil Muttaqin, Takeran. Imam Faham adalah adik dari Muhammad Suhud, paman dari mantan mendiang ketua DPR M Kharis Suhud. Selain perwira militer, pejabat daerah, wartawan, politisi pun ikut menjadi korbannya.

Pengasuh Pondok Pesantren Sabilil Mutaqin (PSM) KH Zakaria (83 tahun) mengatakan, seusai shalat Jumat pada 17 September 1948 pesantrennya didatangi beberapa orang tokoh PKI. Kepala rombongan yang dipimpin aktivis PKI

Suhud. Mereka datang didampingi para pengawal bersenjata yang dikenali sebagai kepala keamanan di Takeran.

"Ketika massa PKI sampai di pesantren Tegalrejo itu, pengasuh pondok, KH Imam Mulyo ditangkap dan dilempari beberapa granat sembari diancam agar mau tunduk kepada ideologi dan partai mereka. Syukurnya granat itu tak meledak," ujar Zakaria.

Karena granat tak meledak, lanjutnya, maka kini ganti para santri yang tadinya diam saja berbalik melawan mereka. Para gerombolan itu ternyata pengecut karena malah lebih memilih lari karena ketakutan. "Mbah Kiai Pesantren Tegalrejo akhirnya bisa lolos dari penculikan," ungkap Zakaria.

Di Takeran PKI juga beraksi. "Sebelum meledak, di sekitar Takeran beterbaran aneka pamflet tentang Muso yang baru pulang dari Moskow. Pesantren Takeran dipilih untuk diserbu karena saat itu menjadi tempat atau basis pergerakan Islam. Kiai Mursyid mau diajak berunding karena sudah tahu pesantrennya terancam akan dibakar," tegas Zakaria.

PKI terus melakukan penangkapan dan penculikan kepada ustadz-ustadz yang lain, seperti Ahmad Baidway, Husein, Hartono, dan Hadi Addaba. Mereka tidak pernah kembali, bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian yang tersebar di berbagai tempat di Magetan.

Yang menimbulkan keheranan adalah, sampai sekarang tempat pembantaian Kiai Mursjid belum diketahui karena jenazahnya belum ditemukan. Bahkan, dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri tidak tercantum nama Kiai Mursjid.

Sedangkan di Ponorogo, PKI pun menyerang Pondok Modern Darussalam Gontor. Putra dari Kyai Pondok Modern Darussalam Gontor, Imam Zakarsyi (alm), yakni Prof dr Amal Fathullah Zakarsyi menyatakan dua kyai utama, Kyai Sahal dan Kyai Ima Zakarsyi dilarikan ke Kediri bersama santri dan beberapa ustadz. Di Pondok yang berada di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak tersebut hanya lurah pondok, Kyai Syoiman Lukman Nur. Dan pelindung atau kepala Desa Gontor, Sukarto.

"PKI langsung menyerbu Gontor. Tapi harus kecewa karena yang ada hanya dua orang saja. Sedangkan santri, ustadz sudah tidak ada," tambahnya sambil mengenang.

Beruntung, lanjut dia, dua orang yang ada di Pondok tidak dihabisi. Hanya saja, semua buku berbau arab dibakar. Pun beberapa bangunan pondok dibumi hanguskan. "Yang sekarang tersisa hanya masjid, padepokan pondok. Yang lain habis dibakar," bebernya.

Malang nasib para ulama dan santri ketika hendak ke Kediri yang berencana mau melewati Kabupaten Trenggalek. "Cuma jalan yang kita tempuh dikuasai PKI. Jadi mau ke Trengalek jalannya keliru, di situ akhirnya ditahan," papar Kyai Zarkasyi.

Kyai Sahal, Kyai Zakarsi, beberapa ustadz Gontor tersebut dibawa ke Desa Sooko, disekap dan disiksa. Para ulama dan santri ini pun lalu dipindah PKI ke Masjid Muhammadiyah yang sekarang berada di Jalan Soekarno Hatta. Masjid tersebut sudah dikelilingi bom. "Ibaratnya tingga menunggu waktu saja. Tinggal komando bilang serang. Semua akan tewas," akunya.

Namun, Allah SWT berkata lain. Saat situasi semakin genting, datang pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Kyai Yusuf Hasim yang berasal dari Pesantren Tebu Ireng dan tentara Siliwangi dari Jawa Barat mengelilingi pasukan PKI. Pada saat itu, jumlah tentara tidak begitu banyak, hanya saja mereka menggunakan taktik untuk menggertak pasukan PKI.

"Di mana-mana tembakan dibunyikan, padahal orangnya tidak terlalu banyak. Akhirnya PKI itu lari dari sekeliling masjid," katanya

Setelah kejadian tersebut, para kyai dan santri Gontor dapat terbebas dari sandraan PKI yang mengancam membunuh dari luar masjid.

Singkat cerita, pada 30 September 1948 laskar Hizbullah dan TNI Divisi Siliwangi berhasil menumpas PKI. Muso dan Amir Sjarifuddin ditembak mati. Sedangkan salah satu tokoh PKI lainnya yakni Dipa Nusantara Aidit berhasil kabur ke Cina tapi banyak juga yang menyebut dia hanya bersembunyi di dalam negeri. Tapi yang jelas kelak dia berhasil menyusun kembali kekuatan PKI yang telah terberai kemudian melakukan pemberontakan dan membunuhi para jenderal pada September 1965.

Itulah wajah buruk PKI. Tapi anehnya rezim kapitalis yang berkuasa saat ini ---yang juga buruk--- malah seolah membiarkan komunis bangkit lagi.[]

Dimuat pada rubrik KISAH Tabloid Media Umat edisi 205:
WASPADA NEO PKI
16 - 29 Muharram 1439 H/ 6 - 19 Oktober 2017

Baru Dua Bulan Merdeka, PKI Sudah Kudeta

"Bukan hanya 1948 dan 1965, sejak Oktober 1945 pun PKI sudah berontak!"

Sebelum melakukan makar dan pembantaian besar-besaran pada 1948 di Madiun dan sekitarnya, Partai Komunis Indonesia (PKI)/kelompok kiri sudah melakukan berbagai upaya pemberontakan di berbagai daerah lainnya bahkan hanya selang dua bulan pasca diproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Bukan hanya 1948 dan 1965, sejak Oktober 1945 pun PKI sudah berontak!" tegas mantan Kepala Staf Korstad ABRI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen kepada *Media Umat*, Jumat (28/9/2018) di rumahnya, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Berdasarkan catatan Kivlan, pada 8 Oktober 1945, gerakan bawah tanah PKI membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Beberapa hari kemudian, AMRI Slawi pimpinan Sakirman dan AMRI Talang pimpinan Kutil menteror, menangkap dan membunuh pejabat pemerintah di Tegal.

Pada tanggal 17-nya, tokoh komunis Banten Ce' Mamat yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang

(DPRS) dan merebut pemerintahan Keresidenan Banten melalui teror dengan kekuatan massanya.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, hal. 184.
Gb.13.2 Musso, seorang pemimpin pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, Hal. 186.
Gb.13.3 Kesatuan-kesatuan TNI dan polisi yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI/FDR Madiun di Gunung Kidul

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 1, hal. 186.
Gb.13.4 TNI mengadakan pengejaran dan pembersihan terhadap anggota-anggota PKI di sekitar Madiun dan Gunung Lawu.

Gb.13.2 Musso, seorang pemimpin pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

Esoknya, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin tokoh komunis Tangerang Ahmad Khoirun membentuk laskar yang diberi nama Ubel-Ubel dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara.

"Tanggal 21 Oktober 1945, PKI dibangun kembali secara terbuka," ungkap Kivlan.

Kemudian API dan AMRI menyerbu Kantor Pemda Tegal dan Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR). "Tapi gagal," ujarnya menceritakan kejadian pada 4 November 1945. Lalu kedua ormas *underbow* PKI itu membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk merebut kekuasaan di Keresidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang.

Berbeda dengan di Tegal, pada 9 Desember 1945, PKI Banten pimpinan Ce' Mamat berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak R Hardiwinangun di Jembatan

Sungai Cimancak. Bahkan, tiga hari kemudian, Ubel-Ubel Mauk yang dinamakan Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman membunuh tokoh nasional Oto Iskandar Dinata.

Seakan tak mau kalah dengan PKI Banten dan Laskar Hitamnya, PKI Cirebon di bawah pimpinan Mr Yoesoef dan Mr Soeprapto membentuk Laskar Merah. Kemudian berhasil melucuti Tentara Republik Indonesia (TRI) dan merebut kekuasaan di Kota Cirebon pada 12 Februari 1946. "Tapi itu hanya berlangsung dua hari. Karena pada tanggal 14, TRI kembali merebut Kota Cirebon dari PKI," beber Kivlan.

Pemberontakan 1948

Pada 1947, kader PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan membentuk kabinet. Namun setahun kemudian tepatnya pada 23 Januari 1948, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet PM Amir dan menunjuk Wapres Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru.

Orang-orang kiri pun tak tinggal diam, pada Januari 1948 PKI membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir untuk beroposisi terhadap Kabinet Hatta.

Hatta pun pada 29 Mei melakukan reorganisasi dan rasionalisasi (ReRa) terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai negeri sipil (PNS) untuk membersihkannya dari unsur-unsur PKI. Masih di bulan Mei, kader komunis lainnya, Muso pulang ke Indonesia setelah 12 tahun berada di Moskow (Uni Sovyet/Rusia).

Lalu, PKI Klaten melalui Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) melakukan pemogokan massal untuk merongrong pemerintahan RI. Bulan berikutnya, yakni pada 11 Agustus, Muso memimpin FDR/PKI dan merekonstruksi Politbiro PKI, termasuk DN Aidit, MH Lukman dan Nyoto.

Dua hari kemudian, Muso bertemu dengan Presiden Soekarno dan diminta untuk memperkuat Perjuangan Revolusi, namun Muso menolaknya dengan jawaban bahwa dirinya pulang untuk menertibkan keadaan yaitu membangun dan memajukan FDR/PKI.

Tapi apa yang terjadi? Pada 19 Agustus, PKI Surakarta malah membuat kerusuhan dengan membakar pameran HUT RI ke-3 di Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Maka pada 26-27 Agustus PKI pun mengadakan konferensi. Pada hari terakhir bulan Agustus, FDR dibubarkan lalu Partai Buruh dan Partai Sosialis berfusi ke PKI.

Pada 5 September, Muso dan PKI-nya menyerukan agar RI berkiblat ke Uni Sovyet. Tentu saja bermunculan pihak yang menentangnya. Sadisnya PKI, tidak segan-segan membunuh siapa saja yang tidak setuju. Lima hari kemudian misalnya, Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo dan dua perwira polisi dicegat massa PKI di Kedunggalar (Ngawi) lalu dibunuh, jenazahnya pun dibuang ke dalam hutan.

Di bulan yang sama, Dokter Moewardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo yang juga sering menentang PKI diculik dan dibunuh PKI, begitu juga Kolonel Marhadi diculik dan dibunuh oleh PKI di Madiun. Polarisasi pun terjadi di kalangan militer. Walhasil, pada 13 September terjadi bentrok

antara TNI pro pemerintah dengan unsur TNI pro PKI di Solo.

Penolakan terhadap PKI semakin meluas, para ulama pun dengan lantang menentang. Lantas apa yang dilakukan PKI? Tentu saja para ulama dibantai pula oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Pada 17 September misalnya, PKI menculik para kiai Pesantren Takeran di Magetan. KH Sulaiman Zuhdi Affandi digelandang secara keji oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

"Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, ratusan orang ditangkap dan dibantai PKI di Pabrik Gula Gorang Gareng," beber Kivlan.

Pada 18 September, Kolonel Djoko Soejono dan Sumarsono mendeklarasikan Negara Republik Soviet Indonesia dengan Muso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin Harahap sebagai Perdana Menteri.

Esoknya, Soekarno menyerukan rakyat Indonesia untuk memilih Muso atau Soekarno-Hatta. Akhirnya pecah perang di Madiun. Divisi I Siliwangi Pimpinan Kolonel Soengkono menyerang PKI dari timur dan Divisi II pimpinan Kolonel Gatot Soebroto menyerang PKI dari barat.

Di hari yang sama, PKI berhasil mempertahankan Madiun, lalu menguasai Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu dan kota-kota sekitarnya.

Pada 20 September, PKI Madiun menangkap 20 polisi kemudian membantainya. Sehari kemudian, PKI Blitar menculik dan menyembelih Bupati Blora Mr Iskandar dan Camat Margorojo Pati Oetoro, bersama tiga orang lainnya yaitu dr Susanto, Abu Umar dan Gunandar. Lalu jenazah mereka dibuang ke sumur di Dukuh Pohrendeng Desa Kedunggirin, Kecamatan Tujungan, Kabupaten Blora.

Dalam catatan Kivlan Zen, selama empat hari dari 18-21 September 1948, PKI menciptakan dua ladang pembantaian (*killing fields*) dan tujuh sumur ---yang diistilahkan sebagai sumur neraka--- di Magetan untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai.

Pertama, Ladang Pembantaian Pabrik Gula Gorang Gareng di Desa Geni Langit. *Kedua,* Ladang Pembantaian Alas Tuwa di Desa Geni Langit. *Ketiga,* Sumur Neraka Desa Dijenan Kecamatan Ngadirejo. *Keempat,* Sumur Neraka Desa Soco I Kecamatan Bendo.

Kelima, Sumur Neraka Desa Soco II. *Keenam,* Sumur Neraka Desa Cigrok Kecamatan Kenongomulyo. *Ketujuh,* Sumur Neraka Desa Pojok Kecamatan Kawedanan. *Kedelapan,* Sumur Neraka Desa Bogem, Kawedanan. *Kesembilan,* Sumur Neraka Desa Batokan Kecamatan Banjarejo.

Tanggal 30 September, Panglima Besar Soedirman mengumumkan bahwa tentara pemerintah RI berhasil merebut dan menguasai kembali Madiun. Namun tentara PKI yang lari dari Madiun memasuki Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Dungus dan membantai semua tawanan yang terdiri dari TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ulama dan santri.

Pada 4 Oktober, PKI membantai sedikitnya 212 tawanan di ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tetapi TNI, ulama dan santri tak menyerah. Mereka bahu membahu berperang melawan PKI.

Hingga pada 30 Oktober para pemimpin pemberontakan PKI di Madiun ditangkap dan dihukum mati yakni Muso, Amir Syarifuddin, Suripno, Kolonel Djoko Soedjono, Maruto Darusman, Sajogo dan lainnya. Sehingga pada akhir November 1948, seluruh wilayah yang dikuasai PKI kembali ke pangkuan Republik Indonesia.[]

Dimuat pada rubrik KISAH Tabloid Media Umat edisi 228: AWAS PKI!
25 Muharram - 8 Safar 1440 H/ 5 - 18 Oktober 2018

Diberi Hati, PKI [1965] Berontak Lagi

Dukungan Soekarno pada PKI semakin menjadi. Walhasil pada 1960 ia meluncurkan selogan Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis).

Entah apa yang ada di benak Presiden Soekarno sehingga *keukeuh* memberi hati kepada PKI. Alih-alih dilarang, Partai Komunis Indonesia malah menjadi bagian dari kabinet pemerintahannya. Padahal sudah jelas-jelas telah membantai ratusan ulama dan juga para pejabat daerah pada percobaan makar di Madiun dan sekitarnya pada 1948.

"PKI tetap tidak dilarang, sehingga tahun 1949 dilakukan rekontruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga 1965," ungkap mantan Kepala Staf Korstad ABRI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen kepada *Media Umat*, Jumat (28/9/2018) di rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada awal Januari 1950, pemerintah dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek melakukan pembongkaran tujuh Sumur Neraka PKI dan mengidentivikasi para korban.

Di Sumur Neraka Soco I ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali dan 40 tidak dikenali, sedang di Sumur Neraka Soco II ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi

"Para korban berasal dari berbagai kalangan ulama dan umara serta tokoh masyarakat," ujar Kivlan.

Seperti tak ada masalah dan dosa sebelumnya, di tahun yang sama PKI mulai mempropagandakan ide busuk komunismenya melalui penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah.

Bukan PKI namanya kalau tidak berulah. Pada 6 Agustus 1951 gerombolan Eteh dari PKI menyerbu Asrama Brimob di Tanjung Priok dan merampas semua senjata yang ada.

Di tahun yang sama, Dipa Nusantara Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno sehingga disukai Soekarno. Pentolan PKI lainnya, Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI.

Entah apa yang dipropagandakan PKI dan apa pula yang ada di benak masyarakat, yang jelas pada 1955 PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil masuk empat besar

setelah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Ulama Resah

Tentu saja itu membuat resah para ulama. Maka pada 8-11 September 1957, mereka berkumpul dalam Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan. Mereka memfatwakan keharaman ideologi komunisme dan mendesak Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Pelarangan PKI dan semua mantel organisasinya. "Tapi ditolak oleh Soekarno," keluh Kivlan.

Tentu saja kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi keras hingga melakukan pemberontakan kepada Soekarno. Sehingga pada 15 Pebruari 1958 mereka mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Namun pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan.

Pada 11 Juli 1958, DN Aidit dan Rewang mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin.

Agustus 1959 PKI mengadakan kongres di Indonesia. TNI berusaha menggagalkannya. "Namun kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno," ungkap Kivlan.

Kabinet Nasakom

Dukungan Soekarno pada PKI semakin menjadi. Walhasil pada 1960 ia meluncurkan selogan Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Bila PNI mendukung wajar karena itu partainya Soekarno tetapi yang aneh Nasakom didukung penuh pula oleh NU. Sedangkan Masyumi secara tegas menolak Nasakom.

Dengan demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari pemerintahan RI. Sebaliknya, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 200 Tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960, Masyumi dibubarkan. "Dengan dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI, padahal hanya karena anti Nasakom," jelas Kivlan.

Pertengahan 1960, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan keanggotaan mencapai dua juta orang.

Maret 1962, PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno dengan diangkatnya DN Aidit dan Nyoto sebagai Menteri Penasihat. Sebulan kemudian PKI pun mengadakan kongres.

Pada 1963, PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia dan mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani untuk dipersenjatai dengan dalih "mempersenjatai rakyat untuk bela negara" melawan Malaysia.

Salah satu ormas Islam yang getol mengingatkan bahaya PKI adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Bukannya sadar telah diingatkan, Presiden Soekarno malah

membubarkan GPII melalui Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 1963, tertanggal 10 Juli 1963.

Tokoh Islam Ditangkapi

Berdasarkan dua Kepres tersebut terjadilah penangkapan tokoh-tokoh Masyumi dan GPII serta ulama lainnya yang anti PKI. Mereka yang ditangkap di antaranya adalah: Buya Hamka, KH Yunan Helmi Nasution; KH Isa Anshari; KH Mukhtar Ghazali; KH EZ Muttaqien; KH Soleh Iskandar; KH Ghazali Sahlan dan KH Dalari Umar.

Desember 1964, Pimpinan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) Chaerul Saleh menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Murba itu didirikan oleh mantan pimpinan PKI Tan Malaka.

Menanggapi peringatan dari pimpinan partai yang didirikan oleh Tan Malaka, mantan pimpinan PKI, tersebut Soekarno mengeluarkan Kepres lagi. Kepres Nomor 1/KOTI/1965 tertanggal 6 Januari tentang pembekuan partai… bukan PKI tetapi pembekuan Partai Murba! "Dengang dalih telah memfitnah PKI!" ungkap Kivlan.

Pada 13 Januari 1965, dua sayap PKI yaitu Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) menyerang dan menyiksa peserta *training* PII di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya dan juga merampas sejumlah mushaf Alquran kemudian dirobek serta diinjak-injaknya.

Di awal tahun tersebut PKI dengan 3 juta anggotanya menjadi partai komunis terkuat selain Uni Sovyet (sekarang

Rusia) dan Republik Rakyat Cina. PKI juga memiliki banyak ormas, antara lain: Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI); Pemuda Rakyat (PR); Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani); Barisan Tani Indonesia (BTI); Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra); dan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI).

Pada 14 Mei 1965, PR, BTI dan Gerwani merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dengan menangkap dan menyiksa serta membunuh penjaga Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet IX Bandar Betsi Pelda Sodjono.

Dua bulan kemudian PKI menggelar pelatihan militer untuk 2 ribu anggotanya di Pangkalan Udara Halim Jakarta dengan dalih "mempersenjatai rakyat untuk bela negara" dan dibantu oleh unsur TNI Angkatan Udara.

Meski telah dibekukan, Partai Murba tetap melakukan gerakan menentang PKI. Maka Presiden Soekarno pun membubarkan partai yang didirikan mantan petinggi PKI tersebut dengan Kepres Nomor 291 Tahun 1965 tertanggal 21 September 1965.

Hingga akhirnya pada 30 September 1965 PKI melakukan percobaan kudeta dengan menargetkan membunuh tujuh jenderal senior karena dengan tegas menolak adanya Angakatan Kelima. Upaya makar tersebut dikenal dengan nama Gerakan G30S/PKI 1965 atau disebut juga Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) 1965.

Dalam Gestapu tersebut PKI menculik dan membunuh enam jenderal senior TNI AD di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur Lubang Buaya di Halim Jakarta.

Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani; Letjen R Suprapto; Letjen MT Haryono; Letjen S Parman; Mayjen Panjaitan dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo.

"PKI juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution," pungkas Kivlan.[]

Dimuat pada rubrik KISAH Tabloid Media Umat edisi 229: PILU GEMPA PALU
9 - 22 Safar 1440 H/ 19 Oktober - 1 November 2018

Gejala PKI Bangkit Lagi, Bermunculan Pasca Reformasi

"Sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka ragam gerakan pemutarbalikan fakta sejarah dan memosisikan PKI sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan RI."

Pada 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan percobaan kudeta dengan menargetkan membunuh tujuh jenderal senior karena dengan tegas menolak adanya angkatan kelima (buruh dan tani dipersenjatai, angkatan satu sampai empat adalah TNI angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian). Upaya makar tersebut dikenal dengan nama Gerakan G30S/PKI 1965 atau disebut juga Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) 1965.

Dalam Gestapu tersebut PKI menculik dan membunuh enam jenderal senior TNI AD di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur Lubang Buaya di Halim Jakarta. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani; Letjen R Suprapto; Letjen MT Haryono; Letjen S Parman; Mayjen Panjaitan dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo.

"PKI juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution," ungkap mantan Kepala Staf Korstad ABRI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen kepada *Media Umat*, Jumat (28/9/2018) di rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

PKI pun membunuh AIP KS Tubun, seorang Ajun Inspektur Polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman Wakil Perdana Menteri (PM) Dr. J. Leimena yang bersebelahan dengan rumah Jenderal Nasution.

PKI juga menembak putri bungsu Nasution yang baru berusia lima tahun, Ade Irma Nasution, yang berusaha menjadi perisai ayahnya dari tembakan PKI, kemudian ia terluka tembak dan akhirnya wafat pada 6 Oktober 1965.

G30S/PKI 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang mebentuk tiga kelompok gugus tugas penculikan, yaitu Pasukan Pasopati dipimpin Lettu Dul Arief dan Pasukan Pringgondani dipimpin Mayor Udara Sujono serta Pasukan Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi.

Kivlan Zen juga menyatakan selain Letkol Untung dan kawan-kawan, PKI didukung pula oleh sejumlah perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dari berbagai angkatan, antara lain:

Angkatan Darat, Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro, Brigjen TNI Soepardjo dan Kolonel Infanteri A Latief.

Angkatan Laut, Mayor KKO Pramuko Sudarno, Letkol Laut Ranu Sunardi dan Komodor Laut Soenardi.

Angkatan Udara, Men/Pangau Laksyda Udara Omar Dhani, Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Sujono.

Kepolisian, Brigjen Pol. Soetarto, Kombes Pol. Imam Supoyo dan AKBP Anwas Tanuamidjaja.

Pada 1 Oktober 1965, PKI di Yogyakarta membunuh Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. "Lalu di Jakrta PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi baru yang telah mengambil alih kekuasaan," ungkap Kivlan.

Esoknya, Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal kemudian mengirim TNI AD menyerbu dan merebut pangkalan udara Halim Perdanakusuma dari PKI.

Soekarni menggelar pertemuan kabinet pada 6 Oktober. Dalam pertemuan tersebut Menteri Penasihat Nyoto berusaha melegalkan G30S, tapi ditolak, bahkan terbit resolusi kecaman terhadap G30S. "Usai rapat, Nyoto pun ditangkap," terang Kivlan.

Penolakan terhadap PKI semakin meluas di kalangan rakyat. Sehingga muncullah aksi besar-besaran anti PKI yang digalang Ansor NU di seluruh Jawa pada 13 Oktober 1965.

Aksi tersebut dijawab PKI dengan cara yang sangat licik. Pada 18 Oktober, PKI menyamar sebagai Ansor Desa Karangasem (kini Desa Yosomulyo), Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansor Kecamatan Muncar untuk pengajian.

Saat Pemuda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU, lalu mereka diracuni kemudian dibantai. Jenazahnya dibuang ke lubang buaya di Dusun Cemetuk Desa/Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

"Sebanyak 62 orang Pemuda Ansor yang dibantai, untungnya ada beberapa pemuda yang selamat dan melarikan

diri sehingga menjadi saksi mata peristiwa. Peristiwa tragis itu disebut Tragedi Cemetuk dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun Monumen Pancasila Jaya," beber Kivlan.

Setelah mendengar keterangan dari saksi mata, per 19 Oktober Ansor dan PKI pun mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa. Bahkan pada 11 November bentrok pun merembet ke Bali.

Pada 22 November 1965, DN Aidit, gembong PKI yang juga menjadi Menteri Penasihat, ditangkap dan diadili serta dihukum mati.

Desember 1965, Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI.

"Tanggal 11 Maret 1965, terbit Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan Negara RI," sebut Kivlan.

Keesokan harinya, Soeharto melarang secara resmi PKI. Kemudian pada April melarang serikat buruh pro PKI yaitu SOBSI.

Tapi anehnya, Soekarno masih saja membela PKI. Pada 13 Februari 1966 secara terbuka di dalam pidatonya di muka Front Nasional di Senayan mengatakan: "Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap nusa dan bangsa sebesar PKI…"

Tentu saja pidato itu mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit kalangan yang mengkhawatirkan PKI akan tumbuh dan berkembang lagi lalu melakukan kudeta lagi seperti pada 1948 dan 1965. Kekhawatiran tersebut dijawab oleh MPR Sementera dengan diterbitkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1965 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan

Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme. TAP MPRS tersebut ditandatangani oleh Ketua MPRS Jenderal TNI AH Nasution.

Todung Mulya Lubis, Bambang Beathor Suryadi, Ribka Tjiptaning, Eva Kusuma Sundari dan Rieke Diah Pitaloka

Pada Desember 1966, Sudisman mencoba menggantikan peran Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI tapi ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 1967. Sedangkan kader PKI lainnya yakni Rewang, Oloan Hutapea dan Ruslan Widjajasastra berhasil kabur dan bersembunyi di wilayah terpencil di selatan Blitar bersama kaum tani binaan PKI.

Setelah merasa cukup kuat, pada Maret 1968, kaum tani PKI di selatan Blitar tersebut menyerang para pemimpin dan kader NU. "Sehingga 60 orang NU tewas terbunuh," beber Kivlan.

Kemudian TNI menyerang balik PKI di Blitar, menumpasnya hingga sampai persembunyian terakhir di pelosok selatan Blitar. Sejak saat itu, hingga 1998, atau sepanjang Orde Baru TAP MPRS tersebut benar-benar dijalankan sangat efektif oleh Soeharto.

Gejala PKI Bangkit Lagi

Pasca Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Soeharto, pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara, beserta keluarga dan simpatisannya yang masih mengusung ideologi komunisme justru menjadi pihak yang diuntungkan dan gejala-gejala PKI bangkit lagi bermunculan.

"Sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka ragam gerakan pemutarbalikan fakta sejarah dan memosisikan PKI sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan RI," keluh Kivlan.

Ia juga menyebutkan gejala PKI bangkit lagi bisa dilihat dari berulangkalinya kongres PKI, di Sukabumi (2000), di Cianjur (2005), di Grabag Kabupaten Malang (2010) untuk menyusun CC PKI baru, kemudian di Banyumas (2015).

Pada 2016, di Jakarta diselenggarakan Simposium Kerukunan Nasional yang diselenggarakan Lemhanas. Dihadiri sebagain besar eks PKI dan para pendukungnya. "Mereka menyuarakan bahwa PKI tidak bersalah dan menuntut pemerintah RI untuk meminta maaf, melakukan rehabilitasi dan memberikan konpensasi kepada anggota PKI yang menjadi korban pada tahun 1965," ungkap Kivlan.

Eks PKI dan para pendukungnya membuat International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) di Den Hag Belanda pimpinan Todung Mulya Lubis dari LBH Jakarta. Mereka menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas tragedi G30S/PKI 1965. "Mereka meminta direhabilitasi serta kompensasi untuk anggota PKI dan keluarganya serta pemerintah Indonesia harus meminta maaf," sebut Kivlan.

Kemudian LBH Jakarta pun menggelar simposium dan diskusi tentang PKI tidak bersalah atas peristiwa G30S/PKI 1965 pada 2016, 2017 dan 2018 dan menuduh yang bersalah adalah TNI AD.

Menurut Kivlan, beberapa anggota PDIP di antaranya Bambang Beathor Suryadi mendesak pemerintah untuk mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang larangan terhadap PKI dan semua ajaran komunis, marxis, leninis dan Mao Tse Tung.

"Upaya adu domba antara umat Islam dengan pemerintah serta propaganda anti Islam semakin membesar seperti tahun 1960-1965. Saat ini teror dengan pembunuhan terhadap ulama atau aktivis masjid, serta terror mental terhadap kegiatan dan aktivis Islam mulai gencar kembali pada masa pileg 2018 dan jelang Pilpres 2019," pungkasnya.[]

Dimuat pada rubrik KISAH Tabloid Media Umat edisi 230:
BENDERA TAUHID DINISTA,
UMAT BANGKIT MEMBELA
24 Safar - 7 Rabiul Awal 1440 H/ 2-15 November 2018

Hari ini, Terjadi Lima Pengulangan Sejarah Jelang Pemberontakan PKI 1965

"Apa yang kita saksikan hari ini adalah pengulangan sejarah sebelum PKI muncul pada 1965, waktu itu memang terjadi seperti yang sekarang sedang berlangsung."

Hari ini terjadi lima pengulangan sejarah jelang terjadinya pemberontakan PKI 1965. "Apa yang kita saksikan hari ini adalah pengulangan sejarah sebelum PKI muncul pada 1965, waktu itu memang terjadi seperti yang sekarang sedang berlangsung," ujar Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i saat ditemui *IslamBangkit.com*, Senin (30/1/2017) di rumah dinasnya, Kompleks DPR Kalibata Blok C 1 Nomor 191, Jakarta Selatan.

***Pertama,* kenaikan harga-harga.** Waktu itu, ketika PKI akan muncul pada 1965 rakyat sangat menderita karena harga-harga meningkat, lapangan pekerjaan sangat susah, sekarang juga terjadi. Di satu sisi malah lapangan pekerjaan

yang masih disisakan itu diambilalih tenaga kerja asing. "Jadi kalau membanjirnya pekerja Cina yang berideologi komunis, tidak usah heran," ujar lelaki yang akrab disapa Romo Syafi'i.

***Kedua,* kriminalisasi ulama.** Ketika PKI akan muncul memang dibikin stigma negatif dulu kepada ulama-ulama lalu dikriminalisasi hingga akhirnya Buya Hamka dan Isa Anshari dipenjarakan.

"Jadi kalau ada nama Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, Munarman, dan terakhir malah pemuda Islam bernama Nurul Fahmi itu cepat dikriminalisasi. Ini bukan pelanggaran hukum yang sebenarnya, tetapi kriminalisasi!" ujarnya.

***Ketiga,* desakan pembubaran partai dan ormas Islam.** Jelang kebangkitan PKI, ada desakan untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena HMI pada waktu itu berani berada di depan berhadap-hadapan dengan CGMI dan gerakan lainnya yang mengarah pada komunis. Partai Islam Masyumi juga distigma sebagai partai garis keras kemudian dibubarkan.

Sekarang ada stigma FPI adalah ormas yang radikal, hanya membuat anarkisme dan sebagainya. Jadi orang tidak akan pernah diberi tahu mengapa FPI *sweeping* kafe dan restoran remang-remang.

"Itu tidak akan diberi tahu bahwa FPI sudah memberi tahu lurah, camat, Polsek, walikota, Kapolres supaya tempat maksiat itu ditutup tetapi tidak digubris juga. Itu tidak akan pernah masuk berita. Yang masuk berita itu, ketika FPI *sweeping* lantaran aparat tidak mau melakukan tugasnya. Kemudian distigma, FPI anarkis. Untuk apa? Supaya muncul desakan bubarkan FPI," bebernya.

Kemudian Parpol Islam, coba lihat, PPP diobok-obok hingga pecah dua. PKS juga hampir diobok-obok dengan pemecatan Fahri Hamzah. PAN diancam dengan kasus-kasus lama. "Pokoknya kalau mereka tidak memberikan dukungan kepada pemerintah yang ada, dipastikan mereka akan hancur. Ini berulang seperti akan munculnya PKI tahun 1965," tegasnya.

***Keempat,* menstigma ideologi Islam itu sebagai ideologi yang tidak masuk akal, yang tertutup.** Dan itu tidak boleh menjadi keyakinan. Dan ini dipidatokan juga oleh Megawati. Islam itu distigma tertutup, intoleran, radikal dan terorisme.

"Ini berarti apa? Kita dilarang untuk beriman kepada akhirat oleh Megawati. Megawati melarang bangsa Indonesia, khususnya umat Islam untuk beriman kepada akhirat," ungkapnya.

Padahal beriman kepada akhirat itu rukun iman ke-5. Dan beritanya bukan ditulis ulama, tetapi diwahyukan Allah SWT dalam Alquran. Lha, kalau Megawati mengatakan itu "*ramalan masa depan*" dan dianggap tidak masuk akal karena "*mereka sendiri belum pernah melihatnya*" ini kan Megawati ingin mengatakan ideologi Islam tidak benar, rukun iman itu keliru.

Sekarang juga beredar viral video orang yang menyatakan tidak perlu bersyahadat bila belum pernah melihat Allah dan Nabi Muhammad.

Ini mirip kejadian tahun 1964. Guru menyuruh murid-muridnya meminta pensil kepada guru sambil memejamkan mata. Guru pun langsung membagikan pensil, murid-murid pun disuruh buka mata dan pensil sudah ada di depannya.

Guru bertanya, ada pensilnya? Murid-murid menjawab ada. "Berarti Ibu guru ada," jawab guru. Kemudian murid-murid disuruh mengulangi perbuatan yang sama namun kali ini disuruh meminta pensilnya kepada Allah. Guru bertanya, ada pensilnya? Murid-murid menjawab tidak ada. "Berarti Allah tidak ada," jawab guru.

"Jadi sama dengan kebangkitan PKI tahun 1965 dulu, menafikan Islam, menafikan rukun Iman. Dan menuduh ideologi Islam itu adalah ideologi tertutup, intoleran, berbahaya untuk kesatuhan dan persatuan," tegasnya.

***Kelima,* mata uang Indonesia pada 1964 bergambar palu arit. Sekarang juga begitu.** Habib Rizieq mengingatkan di mata uang yang baru sekarang, ada gambar palu arit. Sebenarnya, ini harus ditanggapi secara positif dan dinilai sebagai keresahan anak bangsa yang ingin merawat NKRI. "Tetapi kemudian ini dikriminalisasi, dia disebut menghina lambang negara dan memfitnah Bank Indonesia," pungkasnya.[]

Dimuat pada rubrik SEJARAH situs IslamBangkit.com.

Ingatkan Bahaya PKI, Ustadz Alfian Tanjung DibORGOL

Begitu pula fakta PKI itu masih eksis dan ingin mengambil posisi dalam politik nasional. "Itu clear!"

Dengan diiringi gemuruh takbir para pengunjung protes begitu melihat kedatangan Ustadz Alfian Tanjung yang mengenakan rompi terdakwa dengan tangan diborgol dalam sidang perdananya, Rabu (16/8/2017) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Di salah satu sesi sidang, protes tersebut diulang oleh tim penasihat hukum, tampak advokat Ahmad Michdan di jajaran penasihat hukum, yang jumlah totalnya 112 pengacara.

"Terkait pemborgolan, menjadi kewenangan kejaksaan, silahkan dikoordinasikan dengan pihak Kejaksaan Negeri," kata Hakim Ketua Dedi Fardiman.

Pembacaan dakwaan memakan porsi terbesar waktu persidangan. Semua ceramah Alfian yang mengingatkan bahanya PKI di Masjid Mujahidin Jalan Perak Barat 275 Surabaya, yang telah telah diunggah di *youtube*, ditranskripkan dan dibacakan secara utuh.

Ruang sidang yang hanya berkapasitas 40 kursi, tentu tidak cukup menampung pengunjung sidang. Pengunjung berdiri memenuhi area pengunjung dan meluber keluar ruang sidang. Berbagai elemen umat memberikan dukungan moral.

Ustadz Alfian Tanjung (berpeci) sedang di Pengadilan.

Jadwal sidang ditetapkan setiap hari Rabu. Dan saat menghadirkan saksi yang jumlahnya banyak, jadwal sidang ditambah hari Senin. Demikian kata Hakim Ketua sebelum menutup persidangan.

Alfian dikriminaliasi dengan pasal 156 KUHP atau pasal 16 Jo pasal 4b angka 1 angka 2 angka 3, UU RI no 40 tahun 2008. Dengan ancaman hukuman hingga lima tahun hukuman penjara karena dianggap telah menghina Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menyebut pro Cina dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menghadang Dakwah

Pengamat Sosial Politik Iwan Januar menilai kasus Alfian dan kriminalisasi ulama dan dakwah lainnya merupakan cara baru untuk menghadang laju dakwah. "Kriminalisasi ulama dan dakwah ini cara baru untuk menghadang laju dakwah Islam. Terutama dakwah Islam politik dan penegakkan syariat," ungkapnya.

Ia melihat hari ini semakin banyak orang yang semakin berani mengkriminalisasi ulama dan tokoh Islam. Dengan dalih mengancam kebhinnekaan, Pancasila, dan mengganggu NKRI, siapa saja bisa mempidanakan ulama dan dakwah Islam.

Iwan juga menyebutkan para pelaku kriminalisasi ulama itu orang-orang yang kepentingan politik dan bisnisnya terganggu oleh dakwah para ulama yang terbuka dan terus terang.

Tangan Ustadz Alfian Tanjung diborgol

"Dalam kasus ceramah Ustadz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin Surabaya, itu adalah benar. Catatan sejarah tentang laskar Po An Tui yang terdiri dari warga keturunan Cina, yang membantu imperialis Belanda dan NICA untuk menguasai Nusantara," ungkapnya.

Begitu pula fakta PKI itu masih eksis dan ingin mengambil posisi dalam politik nasional. "Itu *clear!* Sayangnya

sekarang dakwah yang menjelaskan hal ini dianggap khayalan dan dianggap mengadu domba," tegasnya.

Pada 26 Februari 2017 memberikan tausyiah Subuh di Masjid Mujahidin. Dalam tausyiahnya, Alvian membahas tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Komunis China (PKC). Tausyiah itu kemudian oleh tim IT Masjid Mujahidin diunggah ke *youtube*.

Seorang warga Surabaya, Sujatmiko, diduga tersinggung mendengar ceramah Alfian tersebut di *youtube*. Sujatmiko yang tak hadir dalam kegiatan itu kemudian melaporkan Alfian ke Polda Jatim. Namun oleh Polda Jatim, kasus itu diteruskan ke Mabes Polri.

Mengenai diunggahnya video itu ke *youtube*, Sekretaris Masjid Mujahidin Muhammad Syahrul Mukarom mengatakan semua ceramah atau tausyiah yang digelar di Masjid Mujahidin pasti diunggah ke *youtube*. Tujuannya adalah untuk penyebaran dakwah dan bukan lainnya.[] **Rif'an/Joy**

Dimuat pada rubrik NASIONAL Tabloid Media Umat edisi 202: LAGI, POLITISI HINA ISLAM!
3 -16 Dzulhijjah 1438 H/ 25 Agustus - 7 September 2017

Muhammad Syafi'i, Anggota Komisi III DPR RI

Sepertinya di Belakang Dia Ada Kekuatan Dahsyat

Nampaknya ada upaya penghancuran secara sistematis terhadap bangsa Indonesia. Salah atunya dengan membiarkan oknum-oknum pejabat negara dibiarkan seenaknya melanggar UU bila UU tersebut dianggap mengganggu kepentingannya. Berbagai UU juga dipaksakan untuk mengkriminalisasi ulama dan Ormas Islam yang dianggap mengganggu kepentingannya. Di seputar fakta tersebut wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i ---yang akrab disapa Romo. Berikut petikannya.

Bagaimana proses kriminalisasi terhadap ulama dilakukan?

Dibikin stigma negatif dulu. Kemudian diupayakan agar umat Islam dan agama lain supaya terprovokasi untuk melihat ulama dalam stigma yang negatif. Hari ini kita juga melihat, Habib Rizieq dituduh yang macam-macam. Ulama-ulama ini

dianggap mengajarkan ajaran yang radikal, intoleran. Karena itu berhati-hati. Ulama ini dianggap menyampaikan pesan-pesan intoleran karena itu berhati-hati. Ini stigma.

Tapi fakta Aksi 411 dan Aksi 212 jauh kan menepis semua stigma itu...

Setiap orang yang memiliki akal sehat pasti mengapresiasi Aksi 411 dan Aksi 212. Betapa indahnya, betapa damainya, betapa sejuknya umat Islam yang turun ke jalan dalam jumlah begitu besar. Ini kan sangat berbeda dari stigma-stigma Islam brutal, bengis dan lain sebagainya. Lalu dibuatlah demo tandingan dengan nama demo Kebhinekaan. Artinya, menuduh Aksi 411 dan Aksi 212 sebagai demo anti kebhinekaan, itu demo intoleran, demo yang memaksakan kehendak.

Setelah distigma negatif, barulah dikriminalisasi. Apa saja dicari kesalahan agar bisa membuat para ulama ini menjadi tersangka dan terjerat hukum.

Misalnya?

Habib Rizieq mengingatkan di mata uang yang baru sekarang, ada gambar palu arit. Sebenarnya, ini harus ditanggapi secara positif dan dinilai sebagai keresahan anak bangsa yang ingin merawat NKRI. Tetapi kemudian ini dikriminalisasi, dia disebut menghina lambang negara dan memfitnah Bank Indonesia.

Kemudian dicari lagi, kesalahan-kesalahan dari para ulama kita yang intinya bagaimana agar para ulama bisa

terjerat hukum. Jadi kalau ada nama Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, Munarman, dan terakhir malah pemuda Islam bernama Nurul Fahmi itu cepat dikriminalisasi.

Ini bukan pelanggaran hukum yang sebenarnya, tetapi kriminalisasi. Contoh semacam Nurul Fahmi. Dia dituduh melanggar Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009. Padahal di Pasal 66 itu menghina dengan cara merobek, membakar, menginjak, dijadikan bungkus barang. Fahmi hanya menulis. Menulis itu, Pasal 67.

Apa bedanya?

Bedanya kalau menghina itu tuntutannya lima tahun. Kalau cuma menulis, tuntutannya setahun. Baik melanggar Pasal 66 maupun 67, pelakunya tidak bisa ditangkap, kecuali dihukum. Karena tuntutannya tidak lebih dari lima tahun. Fahmi ini sudah salah pasal, ditangkap lagi. Padahal hal yang sama dilakukan oleh yang lain. Seperti Metallica, Iwan Fals, Slank, demo kebhinekaan bebaskan Ahok, semua ditulis di bendera Merah Putih. Bahkan Merah Putih juga dijadikan bungkus barang kemudian Jokowi berpidato berdiri di atasnya.

Pembanding lainnya yang menunjukkan memang Islam saja yang dibidik?

Kemarin dengar pidato Megawati? Dalam pidatonya itu, Megawati jelas ingin merubah ideologi Pancasila seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi Pancasila seperti dalam Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang

bisa diperas jadi Trisila dan Trisila bisa diperas lagi menjadi Ekasila yakni Gotong Royong. Dia mengatakan itulah ideologi Pancasila kita. Ini benar-benar melanggar UUD karena Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bukan seperti dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Ada tidak upaya polisi memprosesnya secara hukum? Tidak ada. Karena sekarang tugas polisi itu mengkriminalisasi ulama. Jadi kalau yang melakukan bukan ulama, dipastikan bebas.

Contoh lainnya?

Tengku Zulkarnain, mau turun dari pesawat terbang, itu dipintu keluar sudah dicegat preman-preman dengan segala macam senjata, ada pedang, ada tombak, ada panah ada broti dan sebagainya. Akhirnya Tengku Zulkarnain tidak jadi turun. Ini yang dilanggar bukan hanya UU nasional, tetapi keamanan penerbangan dalam UU internasional.

Lalu pertanyaannya, apakah ini akan diproses secara hukum preman-preman yang mengepung ulama kita ini? Saya pastikan tidak akan diproses secara hukum!

Mengapa?

Karena targetnya adalah kriminalisasi para ulama. Jadi kalau yang melakukan orang lain dan yang menjadi calon korbannya ulama, itu justru mereka anggap bagus.

Dalam pidatonya juga Megawati menistakan agama Islam ya?

Mega dalam pidatonya mengatakan, "*Disisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa "self fulfilling prophecy", para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.*"

Ini berarti apa? Kita dilarang untuk beriman kepada akhirat oleh Megawati? Megawati melarang bangsa Indonesia, khususnya umat Islam untuk beriman kepada akhirat? Padahal beriman kepada akhirat itu rukun Iman ke-5. Dan beritanya bukan ditulis ulama, tetapi diwahyukan Allah SWT dalam Alquran.

Lha, kalau Megawati mengatakan itu "*ramalan masa depan*" dan dianggap tidak masuk akal karena "*mereka sendiri belum pernah melihatnya*" ini kan Megawati ingin mengatakan ideologi Islam tidak benar, rukun Iman itu keliru. Padahal siapa itu Megawati? Saya yakin KTP-nya Islam, tetapi agama Megawati yang sebenarnya saya tidak tahu karena tidak percaya pada rukun Iman.

Saya bersyukur ada warga kita, Baharuzaman yang sudah mengadukan ke Bareskrim. Tetapi saya mewanti-wanti ini tidak akan diproses secara hukum. Karena Megawati itu bukan ulama.

Bagaimana dengan Luhut Binsar Panjaitan?

Ketika Menteri Rizal Ramli dan Menteri Susi menyatakan Reklamasi Teluk Jakarta menyalahi, Luhut bilang enggak, dan menyuruh terus melaksanakan. Dia nantang, dia itu seperti penyampai pesan dari kekuatan yang tidak terlihat, "Itu reklamasi, lanjutkan!"

Ketika orang meributkan Freeport ekspor konsentrat karena melanggar UU Minerba Tahun 2009, dalam UU tersebut konsentrat harus dimurnikan di dalam negeri, sehingga menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan negara, maka Luhut dengan santai bilang, kalau begitu UU-nya dirubah. Bukan eksport yang melanggar UU yang disetop tetapi UU-nya yang dirobah.

Kemudian ada lagi UU yang dilanggar, yakni tentang pulau pesisir. Jadi Luhut ini *trouble maker*, kurang mengindahkan tatanan hukum, sepertinya di belakang dia ada kekuatan yang dahsyat. Hukum apa saja yang melanggar programnya, jangan programnya yang dihentikan tetapi hukumnya yang harus dirobah. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga oleh komunis.

Selain ulama yang dikriminalisasi, ormas Islam pun didesak untuk dibubarkan...

Iya, mirip jelang kebangkitan PKI 1965, waktu itu ada desakan untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena HMI berani berada di depan berhadap-hadapan dengan CGMI dan gerakan lainnya yang mengarah

pada komunis. Partai Islam Masyumi juga distigma sebagai partai garis keras kemudian dibubarkan.

Sekarang hal itu berulang juga. Sekarang ada stigma FPI adalah ormas yang radikal, hanya membuat anarkisme dan sebagainya, bubarkan FPI. Jadi orang tidak akan pernah diberi tahu mengapa FPI *sweeping* kafe dan restoran remang-remang.

Padahal sebelum *sweeping*, FPI sudah memberi tahu lurah, camat, Polsek, walikota, Kapolres supaya tempat maksiat itu ditutup tetapi tidak digubris juga. Protap yang dilakukan FPI itu tidak akan pernah masuk berita. Yang masuk berita itu, ketika FPI *sweeping* lantaran aparat tidak mau melakukan tugasnya. Kemudian distigma, FPI anarkis. Untuk apa? Supaya muncul desakan bubarkan FPI.

Kemudian Parpol Islam, coba lihat, PPP diobok-obok hingga pecah dua. PKS juga hampir diobok-obok dengan pemecatan Fahri Hamzah. PAN diancam dengan kasus-kasus lama. Pokoknya kalau mereka tidak memberikan dukungan kepada pemerintah yang ada, dipastikan mereka akan hancur. Ini berulang seperti akan munculnya PKI tahun 1965.[]

Dimuat pada rubrik WAWANCARA Tabloid Media Umat edisi 190:
KEKUATAN BESAR DI BALIK
KRIMINALISASI ULAMA DAN ORMAS ISLAM
6 - 19 Jumadil Awal 1438 H/ 3 - 16 Februari 2017

Muhammad "Romo" Syafii,
Anggota Komisi III DPR RI

Pemerintah Erat dengan Negara Komunis, Gejala PKI Bangkit

Disadari atau tidak oleh rezim Jokowi, banyak kebijakannya yang justru seakan menjadi lahan yang subur untuk bangkitnya kembali komunis/PKI. Sebagian di antaranya terungkap dalam wawancara wartawan tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Romo Syafii, anggota komisi DPR RI yang melingkupi tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Berikut petikannya.

Apakah impor 5000 senjata ilegal ada kaitannya dengan upaya kebangkitan PKI?

Kan ada informasi yang tidak bisa kita tentukan mana yang paling benar ya tentang senjata ilegal. Dari segi jumlah

saja Panglima TNI mengatakan lima ribu. Menkopolhukam mengatakan lima ratus. Dari satu pihak mengatakan ini akan digunakan oleh Polri. Menkopolhukam bilang ini pesanan dari BIN.

Artinya, situasi ketika tidak ada pedoman yang pasti itu benar atau salah, harus begini harus begitu dan sama-sama diucapkan oleh pejabat yang kompeten. Nampaknya sudah menjadi tren di Republik ini. Sehingga kalau kita mau jujur, situasi seperti itu adalah lahan empuk untuk tumbuhnya paham-paham sosialis komunis.

Jadi sengaja atau tidak, sadar atau tidak ketika tidak ada lagi pedoman yang dijadikan anutan maka rakyat kehilangan arah. Ketika rakyat kehilangan arah, itu menjadi pintu masuknya dokrin paham-paham komunis yang menawarkan solidaritas, kebersamaan dan sebagainya. Walau substansinya mereka tidak mengakui adanya ajaran agama.

Apakah ini juga mirip dengan impor senjata jelang pemberontakan PKI 65?

Saya kira tidak ada yang bisa dijadikan pedoman. Situasi seperti ini memang sengaja diciptakan. Bahwa ada kesamaan, iya.

Kondisi ekonomi juga ya?

Situasi perekonomian yang juga sudah benar-benar mengkuatirkan keuangan negara. Menurut UU No 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, negara tidak boleh berutang lebih dari 30 persen APBN. APBN kita sekarang kan sekitar

2100 trilyun. Sedangkan utang kita sudah 4000 trilyun, jelas ini sudah melanggar UU.

Akibatnya, pembebanan itu semakin dirasakan oleh rakyat. Harga-harga yang melambung tinggi, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka jadi tidak punya penghasilan padahal tetap punya kebutuhan.

Dengan kebutuhan yang ada, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan berhadapan dengan harga yang melambung tinggi, ini kan kondisi kerawanan yang mudah diprovokasi ke arah tertentu. Apalagi ada tawaran-tawaran bahwa kalau dia mengikuti tawaran tertentu dia bisa mendapatkan kemudahan dari semua kesulitan untuk memenuhi kebutahannya. Ini lahan empuk juga. Dan apakah ini memang dibiarkan atau didesain, kita juga tidak tahu.

Tapi mirip kondisi jelang tahun 1965...

Ya, di tahun '65 juga begitu. Nah, situasi ini sebenarnya bisa diatasi kalau pemerintah mau. Makanya ini juga lahan ya.

Pemerintah juga mempertontonkan ketidakadilan di bidang hukum ya?

Ketidakadilan di bidang hukum yang dipertontonkan oleh pemerintah. Kita sudah capai mendiskusikan ada orang hanya masuk ke dalam ruangan tunggu bandara tidak melepaskan jamnya, ini sampai ke persoalan pidana. Karena dia dibentak, dia balik marah. Itu terjadi di di Sulawesi Utara.

Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata hukum, ya memang dia tidak boleh marah karena dia melanggar hukum.

Tapi masyarakat melihat ini lagi-lagi adalah keanehan karena di bandara yang sama banyak orang membawa senjata tajam, tombak dan kepala babi, masuk untuk mengejar Fahri Hamzah. Tapi itu dibiarkan dan terkesan malah difasilitasi.

Bahkan ketika keluar dari bandara, mereka bukannya diusut dan dihukum tapi malah mendapatkan jamuan makan dari pejabat tertentu. Ini kan sangat telanjang. Masyarakat dibiarkan tidak percaya kepada sistem.

Yang barusanlah misalnya. Ada pengaduan ujaran kebencian dilakukan Vicktor Laiskodat tapi tidak ditanggapi. Ketika yang dianggap melakukan ujaran kebencian itu Jonru, diadukan oleh orang yang separtai lagi dengan Vicktor. Jonru kini sudah ditahan. Sedangkan Victor yang lebih dahulu dilaporkan tidak diapa-apakan.

Itu artinya apa?

Membiarkan masyarakat tidak percaya kepada sistem. Itu berarti menyuruh masyarakat mencari sistem sendiri sistem yang mereka percayai. Padahal harusnya para penegak hukum itulah yang melaksanakan sistem.

Tetapi kemudian secara telanjang seakan-akan memang didesain agar masyarakat tidak percaya pada sistem hukum dan aparat yang ada. Ini kan berarti ada keinginan atau sesuatu yang direncanakan agar masyarakat mencari sistemnya sendiri. Ini juga lahan untuk munculnya paham sosialis, satu nasib sepenanggungan. Ini sangat berbahaya.

Dalam waktu bersamaan pemerintah juga melakukan pembiaran bangkitnya PKI?

Sudah mulai ada perbedaan tentang keberadaan PKI itu sendiri. Secara konstitusi, TAP MPR No 25 Tahun 1966 kan masih berlaku. TAP MPR tersebut menetapkan bahwa komunis paham yang terlarang di Indonesia. Di RUU KUHP yang kami susun pun masih disebut sosialis, komunis itu sebagai paham yang terlarang.

Tapi kan sekarang sudah banyak yang bunyi, "Ngapain komunis dipersoalkan?" Bahkan ada yang mengatakan, "Tidak mungkin ada paham itu lagi." Ada juga yang mengatakan, "Jangan dibesar-besarkan." Dan yang membingkai pendapat itu pun muncul buku *Aku Bangga Jadi Anak PKI.* Kemudian sudah mulai berkibar gambar palu arit. Kemudian sudah banyak yang memakai baju kaos palu arit.

Ini kan semacam *test the water*, untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat kalau ini dimunculkan lagi. Sejauh ini ada yang diproses hukum dan ada yang dibiarkan. Artinya, yang namanya tes itu tentu saja ada ukurannya. Sehingga bisa mengetahui berapa persentasenya peluang bangkitnya kembali komunis. Dan secara nyata ini kan ditanggapi oleh Panglima TNI dengan nonton bareng (nobar) film Pemberontakan G 30 S/PKI karena melihat bahayanya kalau komunis tumbuh dan berkembang.

Nah, si pengetes *test the water* juga melihat bahwa sudah tidak bulat suara lagi aparat negeri ini dengan Panglima TNI. Salah satunya ya Watimpres Jokowi seperti tidak mendukung atau menolak. Lagi-lagi persentasi penolakan PKI itu

dikurangi dengan pendapat tokoh ini, pendapat pejabat itu, mendapat pakar anu.

Iya, Menteri Luhut juga bilang pakai kaos palu arit itu tren anak muda...

Ini kan macam-macam upaya sistematis yang patut dikuatirkan oleh mereka yang peduli pada Pancasila dan UUD 1945. Gejala bangkitnya kembali PKI kan muncul dengan semakin eratnya pemerintah Indonesia dengan negara-negara komunis dan semakin banyaknya migran dari negara komunis. Ini tidak boleh dianggap tidak ada hubungannya, tidak boleh dianggap berjalan sendiri-sendiri.

Kita harus kuatir tentang keberadaan Pancasila, eksistensi UUD 45. Walau mereka pidato masih bilang Pancasila, UUD 45, saya Pancasila, saya Indonesia, macam-macam. Tapi faktanya yang berbau komunis berjalan.

Apakah Anda melihat hal ini terjadi karena komunis berhasil melakukan infiltrasi ke berbagai lembaga negara dan elemen masyarakat?

Iya, kemampuan komunis kan memang seperti itu. Karena pendekatannya kan melalui pendekatan yang hari ini tidak didapatkan masyarakat.

Apa itu?

Rasa kebersamaan, sepenanggungan, setia kawan, sosialisme. Jadi, orang tertarik. Padahal di balik itu secara

tidak sadar orang ini terekrut menjadi orang yang tidak akan protes kepada komunis atau sudah mau menjadi penganut komunis dan lebih berbahaya lagi menjadi pembela paham itu dengan jabatan-jabatan yang disandangnya.

Menurut saya, kita patut mengingatkan anak bangsa ini, kalau memang kita ingin bangsa ini masih berdasarkan Pancasila dan UUD 45, harus memiliki kewaspadaan yang besar terhadap pengaruh pemahaman komunis ini. Karena kita kuatir itu tidak hanya ada di masyarakat pinggiran tetapi bahkan sudah masuk ke sistem. Orang-orang di dalam sistem itu ada yang sudah terpengaruh, atau sekedar mendukung bahkan sudah menjadi pembela komunis.

Di eksekutif?

Semua lini.

Di DPR juga?

Di semua lini. Jangan dibatasi, ada di mana-mana itu. Bahkan pemimpin politik juga ada yang bicara jangan percaya pada akhirat, karena akhirat itu hanya ramalan masa depan.

Megawati?

Ini kan sudah berbahaya. Membuat orang tidak percaya pada akhirat, karena akhirat ada dalam kitab suci berarti jangan percaya kitab suci. Karena kitab suci itu firman Allah jadi jangan percaya pada Tuhan. Ini kan luar biasa.

Diduga ada seminar mendukung PKI di YLBHI, tapi yang dibubarkan malah pendemonya. Bagaimana tanggapan Anda?

Yang pasti kan tidak ada penjelasan resmi tentang apa isi pertemuan di YLBHI. Yang munculkan justru bagaimana polisi marah terhadap pendemo. Pokoknya semua demo yang dianggap mengkritisi kebijakan negara di negeri ini selalu dibungkam.

Ustadz Alfian Tanjung yang getol membeberkan fakta dan data PKI sudah dinyatakan tidak bersalah oleh hakim tapi ditahan lagi...

Iya, pokoknya terus dibungkam. Kalau mau aman di negeri ini, apa saja yang dilakukan pemerintah, dukung. Pemerintah memasukan tenaga kerja asing dan rakyat kita tidak dapat pekerjaan, lalu kita dukung, itu tidak ditangkap. Tapi kalau kita bilang, "Apa maksud pemerintah rakyat banyak yang tidak bekerja tetapi tenaga asing diterima masuk untuk mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan rakyatnya," hati-hati saja ini orang bisa ditangkap.

Kemudian ada Victor tidak ditangkap dan Jonru ditangkap kita bilang "oh itu sudah pas" aman. Tapi kalau kita bilang "Itu tidak adil! Kok diskriminasi?" orang ini bisa ditangkap juga. Pokoknya jangan dikritik, karena negara ini sudah berubah menjadi otoritarianisme.

Tanda-tanda PKI bangkit?

Iya, itu tanda-tanda PKI bangkit.[]

Dimuat pada rubrik WAWANCARA I Tabloid Media Umat edisi 205:
WASPADAI NEO PKI
16 - 29 Muharram 1439 H/ 6 - 19 Oktober 2017
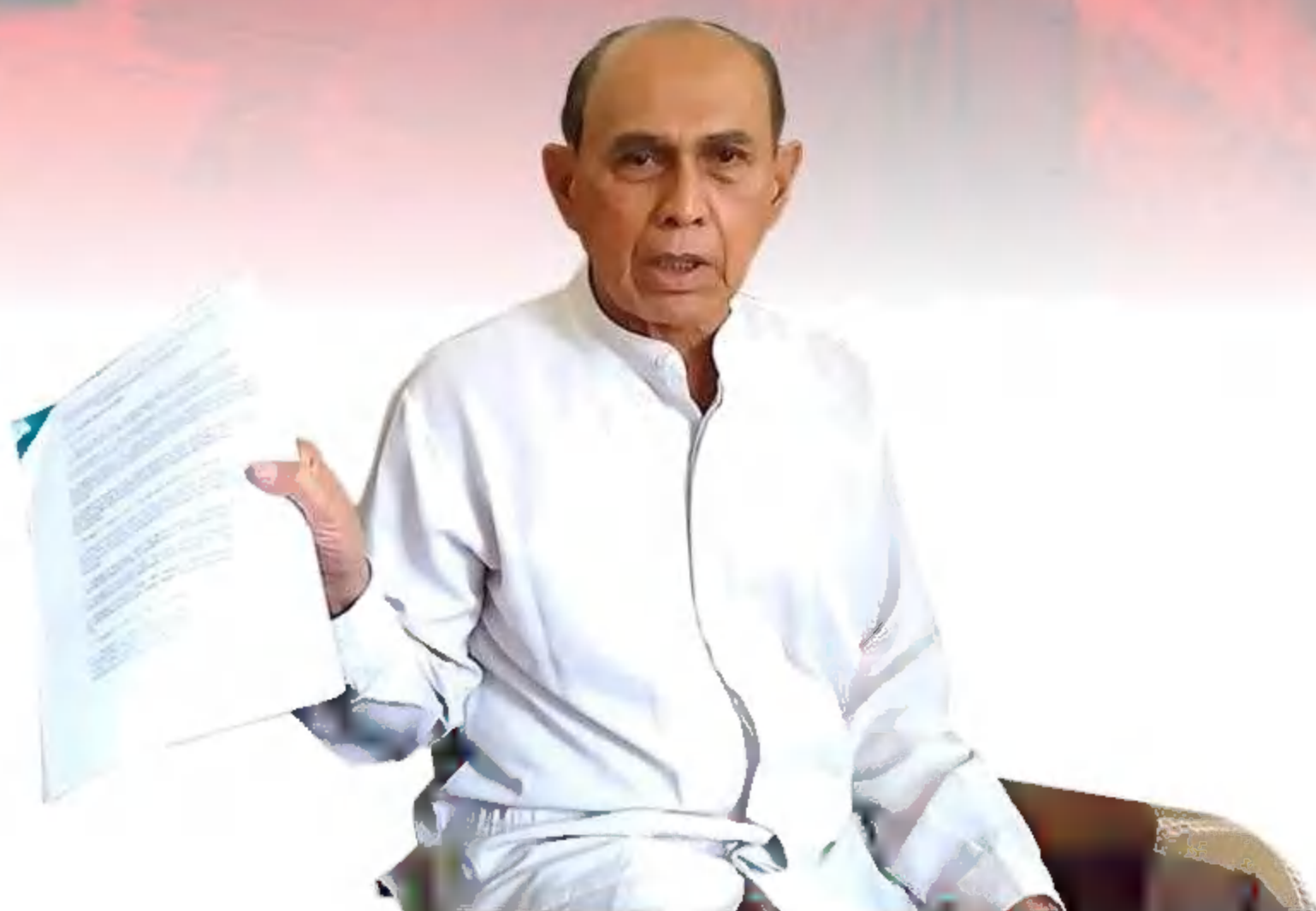
Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad ABRI

Bila PKI Hidup Lagi, Tragedi 1948 dan 1965 Terulangi

Tak sedikit dari publik yang termakan propaganda bahwa Partai Komunis Indonesia atau komunisme tak mungkin hidup lagi. Tentu saja hal itu akan membuat rakyat menjadi lengah, padahal kaum kiri ini secara sistematis tengah berupaya untuk membangkitkan kembali ajaran sesat penuh kekerasan tersebut. Di seputar itulah wartawan

Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai mantan Kepala Staf Kostrad ABRI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen. Berikut petikannya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan pemutaran film G30S/PKI tidak mendidik. Pendapat Anda bagaimana?

Apakah PSI itu tidak tahu? Sehingga menyatakan nobar film G30S/PKI ini tidak mendidik? Justru dengan nobar ini mendidik. Mewaspadai PKI bangkit lagi. Terbukti mereka sudah bersuara melalui anggota-anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta TAP MPRS tentang pelarang PKI dicabut. Sekarang mau ada Pilpres 2019, mereka mendukung lagi Jokowi. Kalau Jokowi menang lagi, mereka akan meminta itu lagi seperti pada tahun 2014.

Dengan fakta dan data ini, maka nobar itu adalah mendidik. Kalau PSI mengatakan itu tidak mendidik, berarti dia pro PKI, jangan dipilih! Sama dengan PDIP, jangan dipilih! Kalau TAPS MPRS sampai dicabut, berarti PKI boleh hidup maka akan terjadi tarung horizontal di lapangan. Terjadi lagi pembunuhan besar-besaran seperti pada 1948 dan 1965.

Maka nobar ini mendidik, agar rakyat hati-hati. Mereka akan mengambil kesempatan dalam Pileg dan Pilpres 2019 dengan target mencabut TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang larangan terhadap PKI dan semua ajaran komunis, Marxis, Leninis dan Mao Tse Tung.

Dan mereka sudah membentuk PKI gaya baru hasil kongres 2010 di Grabag Magelang dan pada 2015 di

Banyumas. Sudah tersusun, pengurus di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan mereka tinggal proklamirkan saja kalau sudah dapat mencabut TAP MPRS itu.

Siapa nama ketua tingkat pusatnya?

Wahyu Septiaji.

Dalam susunan pengurus tersebut siapa tokoh-tokoh yang dikenal publik luas?

Tidak ada yang dikenal publik. Tapi nanti ketika TAP MPRS itu dicabut, muncul semuanya termasuk tokoh-tokoh publiknya.

PDIP?

Orang-orang PDIP itu banyak mendukung dan bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Salah satunya di bidang kepartaian, ada tanda tangannya Megawati, Eva Kusuma Sundari. Itu sudah dilakukan sejak 2012. Dan kemudian setiap bulan mereka mengkader orang-orang PDIP di kantor PDIP Lenteng Agung.

Tapi, Golkar dan Nasdem juga malah ikut-ikutan kerja sama di bidang kepartaian dengan Partai Komunis Cina. *Gimana* ini, negara kita jadi semakin kacau balau. Padahal di Cina itu, orang Islam Xinjiang dikejar-kejar tidak boleh shalat, tidak boleh puasa, masjidnya dihancurkan.

Di Indonesia juga terbukti, komunis menyerang masjid pada 1948 dan 1965. Dan sekarang masjid *ditakut-takutin*. Caranya pakai tangan aparat. Dengan demikian, sekarang

umat Islam mulai *ditakut-takutin* lagi oleh komunis. Kalau tokoh-tokoh umat Islam tidak sadar, maka masuk perangkap komunis.

Pada 2014, memang mereka minta apa ke Jokowi?

Keinginan mereka untuk direhabilitasi itu dinyatakan kepada Jokowi pada 2014, karena mereka mendukung Jokowi. Setelah Jokowi menang, mereka meminta Jokowi mencabut TAP MPRS tentang larangan PKI. Kemudian mereka direhabilitasi dan mereka meminta konpensasi satu orang Rp 2 miliar.

Mereka masuk di partai-partai yang paling banyak mereka masuk di PDIP. Terbukti itu anggota DPR dari PDIP Bambang Beathor Suryadi meminta Presiden mencabut TAP MPRS. Kemudian Ribka Tjiptaning, anggota DPR dari PDIP juga meminta supaya dicabut TAP MPRS itu. Dan juga ada pernyataan dan rapat mereka, ikut-ikutan itu sebangsa Eva Kusuma Sundari, Oneng (Rieke Diah Pitaloka), yang keduanya juga anggota DPR dari PDIP juga minta. Dan banyak anggota PDIP mendukung supaya TAP MPRS tentang pelarangan PKI dicabut.

Jadi mereka mau eksis lagi, mau tampil lagi. Masuk di DPR dan juga kalau sudah banyak pendukungnya di DPR dan MPR, mereka mau cabut TAP MPRS, dan PKI bangkit lagi Tapi untungnya Jokowi tidak mau mencabut TAP MPRS tersebut.

Itu terang-terangan kok. Baru kemarin (Kamis, 27 September) sore, Untung Bejo yang sama saya debat di *tvOne*,

dia berbicara (demonstrasi) di depan Istana supaya Jokowi merehabilitasi mereka, dan menyatakan yang bersalah itu ABRI.

Untung Bejo ini anggota PKI tetapi tidak mengaku orang PKI, dia ngakunya anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). IPPI itu *underbow*-nya PKI! Mengapa dia ngotot benar bahwa PKI tidak bersalah? Berarti mereka PKI!

Ya, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam juga mengatakan kudeta 1965 itu masalah internal Angkatan Darat…

Fakta sejarahnya begini.. dalam Mahkamah Militer Luar Biasa, setelah pemberontakan komunis yang dalam hal ini (dimajukan sebagai terdakwanya adalah) Komandan Batalion Cakra Birawa Letkol Untung. Dia menculik dan membunuh para jenderal yang tidak mau merestui adanya angkatan kelima (buruh dan tani yang dipersenjatai). Buruh tani ini termasuk orang-orangnya PKI. Berarti seperti angkatan kelimanya buruh tani yang dipersenjatai di Cina dan komunis berkuasa.

Padahal Letkol Untung ini diperintah Ketua PKI DN Aidit. Sebelum diadakan penculikan, DN Aidit bertemu dengan Untung di Cawang untuk merencakan penculikan.

Jadi kejadian 1965 itu PKI memperalat dan menggunakan Letkol Untung, setelah Letkol Untung membentuk pemerintahan yang disebut sebagai Dewan Revolusi dengan menteri-menteri yang sudah ditunjuk, setelah mereka berkuasa, baru nanti DN Aidit mengambil alih. Seperti

kejadian tahun 1948, itu Kolonel Joko Suyono memproklamirkan Republik Sovyet Indonesia setelah itu diambil alih oleh Muso (pimpinan PKI waktu itu). Jadi pakai tentara dulu, baru diambil alih oleh pimpinan PKI-nya.

Dalam upaya mencapai tujuannya, PKI kerap membunuhi orang yang menentangnya ya…

Tahun 1948 mereka membunuh para kiai, para tokoh, dimasukan ke lubang Soco di Magetan, Gubernur Suryo juga disiksa dan dibunuh. Tahun 1965 PKI begitu juga. Orang NU dan Banser mereka bunuh, di Cemetuk 62 orang, di Solo tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun NU mereka bunuh ketika PKI menguasai Solo pada tanggal 1-15 Oktober. Di Blitar, Medan dan Bali juga begitu. Mereka membunuh duluan, baru dilawan lalu terjadilah konflik horizontal.

Kalau mereka tidak bangkit lagi setelah reformasi dan menunjukkan dirinya bahwa mereka tidak bersalah katanya, kemudian mereka minta TAP MPRS tentang larangan PKI, berarti PKI itu boleh dihidupkan lagi. Apalagi mereka minta konpensasi, minta rehabilitasi. Lho, berarti itu mereka minta PKI hidup lagi, kalau hidup lagi nanti akan terulang lagi peristiwa seperti tahun 1948 dan 1965![]

Dimuat pada rubrik WAWANCARA I Tabloid Media Umat edisi 228: AWAS PKI!

25 Muharram - 8 Safar 1440 H/ 5 - 18 Oktober 2018

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Dengan Kehidupan Islam, Komunisme Tak Berkembang

Pertentangan kaya dan miskin akan semakin lebar selama Indonesia tetap menerapkan aturan yang lahir dari kapitalisme-demokrasi. Sehingga itu menjadi suluh bagi komunisme untuk bangkit lagi. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hadir dengan menjadikan Islam sebagai solusi di negeri mayoritas Muslim ini. Tapi malah disamakan dengan PKI. Di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto berdiskusi. Petikannya silakan baca di bawah ini.

Ada pihak yang mengatakan tidak ada komunis karena Indonesia beragama?

Sebagai sebuah paham atau ideologi, komunisme sebagaimana juga kapitalisme dan liberalisme, akan selalu ada di mana pun, termasuk di negeri ini, selama ada orang yang

mempercayai dan mengembangkannya. Dan untuk menjadi penganut paham komunisme, seseorang tidak harus tidak beragama.

Tokoh-tokoh komunis di masa lalu seperti Muso, juga Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pertama, Semaun, adalah seorang Muslim, bahkan keduanya pernah aktif sebagai anggota SI (Sarikat Islam). Semaun malah pernah penjadi salah satu pimpinan SI. Karena itu, meski Indonesia adalah negara beragama, tidak otomatis paham komunisme tidak mungkin ada.

Tapi bukankah ideologi komunisme dibangun di atas fondasi ateisme?

Pada intinya, komunisme adalah paham yang mementingkan kelompok (komunal), lawan dari individual yang mengagungkan kebebasan (liberalisme) individual (individualisme). Dan untuk menjadi penganut komunisme tidak harus menjadi orang yang tidak bertuhan (ateis). Banyak aktivis komunis, bahkan pimpinan PKI, di masa lalu seperti yang disinggung tadi adalah seorang Muslim. Jadi komunis tidak selalu ateis, tapi ateis biasanya adalah komunis.

Jadi meskipun pengemban komunisme itu percaya Tuhan bahkan beragama Islam, tetap tidak boleh eksis?

Iya. Karena komunisme, sebagaimana juga kapitalisme adalah paham yang landasannya bertentangan dengan akidah Islam. Jadi jelas sesat dan menyesatkan. Tak boleh eksis. Juga,

salah satu prinsip perjuangan komunisme adalah pertentangan kelas. Jadi dalam komunisme ada watak kaostik (ribut), bahkan cenderung revolutif yang menghalalkan segala cara untuk mengalahkan siapa saja yang dianggap lawan dari kaum proletar.

Ini tentu akan sangat berbahaya. Ketika paham ini berkembang, masyarakat akan selalu dalam suasana pertentangan antara berbagai kelompok, khususnya antara yang disebut sebagai kelompok proletar (kaum buruh) dan kelompok borjuis (pemilik modal), termasuk juga memusuhi kaum beragama, khususnya Islam. Bagaimana masyarakat seperti ini akan menghasilkan ketenangan dan ketenteraman?

Apakah Anda melihat saat ini ada indikasi kuat bahwa PKI atau komunis bangkit lagi?

Sebagai organisasi, mungkin tidak mudah buat PKI bangkit lagi karena sudah dilarang sebagaimana tertuang dalam putusan MPRS dulu. Tapi, komunisme sebagai sebuah paham akan mudah bangkit, tumbuh dan berkembang lagi. Indikasinya sangat nyata.

Beberapa di antaranya pernah disampaikan secara terbuka oleh Habib Rizieq. Adanya tuntutan pencabutan TAP MPRS NO. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI serta penghapusan sejarah pemberontakan PKI dari kurikulum pendidikan nasional. Siapa lagi yang menuntut bila bukan simpatisan atau pendukung PKI?

Lalu, ditiadakannya Penelitian Khusus (Litsus) bagi pejabat publik untuk buktikan bersih diri dari PKI. Hal ini

membuat orang-orang yang dulu tersangkut akan dengan mudah melenggang masuk ke berbagai lini jabatan publik, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Maraknya terbit buku dan artikel, logo, foto-foto dan gambar-gambar serta berbagai kegiatan seperti diskusi, bahkan demonstrasi, yang pada intinya mengenalkan serta membela PKI, bahwa PKI bukanlah pelaku tapi korban sehingga pemerintah mestinya meminta maaf kepada PKI. Dan lainnya.

Bisa disebutkan kemiripan kondisi-kondisi PKI jelang berontak dahulu dengan sekarang

Dulu menjelang PKI berontak, ada banyak ulama yang ditangkapi bahkan dibunuh. Sekarang pun begitu, meski belum sampai taraf yang sangat masif. Tapi sebagai permulaan, terjadinya pembunuhan para kiai, ustaz dan tokoh masyarakat di beberapa daerah harus sangat diwaspadai sebagai indikasi bangkitnya PKI.

Lalu, dulu PKI minta Masyumi dan HMI dibubarkan. Sekarang, HTI sudah dibubarkan. Info menyebutkan, setelah HTI, beberapa ormas Islam yang dinilai radikal juga akan dibubarkan.

Dulu jelang PKI berontak, hubungan dengan Cina sangat erat. Kini juga begitu. Dulu ada usaha adu domba antar berbagai kelompok masyarakat, khususnya antara ormas Islam, sekarang juga terjadi.

Tanggapan Anda dengan pernyataan Kasat Intel Polres Metro Bekasi AKBP Herli Yudo yang menyebut "HTI enggak lebih dari PKI"?

Itu tudingan sangat ngawur. Itu tudingan dari orang yang tak berilmu dan tidak berakhlak. Apalagi kalau dia Muslim. Sangat tidak pantas mengatakan seperti itu. Bagaimana bisa saudaranya sesama Muslim, yang tengah sungguh-sungguh berjuang untuk kebaikan negeri ini, disetarakan dengan PKI, sebuah organisasi yang sesat dan telah menumpahkan darah ribuan orang di masa lalu? Ini orang otaknya di mana?

Mengapa HTI tidak bisa disamakan dengan PKI?

HTI jelas organisasi yang berdasar Islam, sedang PKI berdasar komunisme bahkan ateisme. Apakah Islam sama dengan komunisme atau ateisme? HTI berjuang untuk tegaknya syariah secara kaffah, PKI untuk masyarakat tanpa kelas.

HTI berjuang untuk terwujudnya rahmat bagi sekalian alam. PKI jelas-jelas menimbulkan penderitaan bahkan kematian banyak orang.

HTI berdakwah atau berjuang mengikuti metode atau jalan dakwah Rasulullah, sedang PKI dengan cara menimbulkan pemberontakan disertai pembunuhan dan adu domba.

Apakah anggota DPRD Kaltim dari PDIP, Ahmad Vanandza, bisa diindikasikan pro komunis atau paling

tidak menista agama Islam karena menghujat khilafah ajaran Islam sebagai kotoran manusia?

Ya, jelas sekali ia menista Islam. Saya tidak mengatakan dia pro komunis, tapi salah satu ciri PKI memang tak segan menista agama, utamanya Islam, karena Islam dianggap sebagai penghalang terbesar tercapainya cita-cita mereka. Maka mestinya tindakan anggota DPRD yang menghina khilafah itu tidak dibiarkan begitu saja. Harus diproses secara hukum.

Lantas apa yang harus dilakukan segenap bangsa Indonesia agar PKI atau komunisme tidak bangkit lagi?

Satu-satunya jalan adalah dengan tegaknya kehidupan Islam dengan diterapkan syariah secara kaffah sehingga rahmat yang dijanjikan benar-benar terwujud. Dengan keadaan seperti itu, komunisme tidak akan berkembang karena tidak akan ada bahan untuk memunculkan pertentangan kelas.

Apalagi dengan tegaknya kehidupan Islam, masyarakat akan dibina secara langsung *aqliyah* atau cara berfikirnya dan nafsiyahnya sehingga mereka paham benar mana yang *haq* yang harus dibela, dan mana yang batil, yakni komunisme dan paham sekuler lain, yang tidak boleh dianut apalagi dibela.[]

Dimuat pada rubrik WAWANCARA II Tabloid Media Umat edisi 228: AWAS PKI!
25 Muharram - 8 Safar 1440 H/ 5 - 18 Oktober 2018

Riwayat Penulis

Penulis bernama lengkap **Joko Prasetyo** dan kerap dipanggil Joy adalah wartawan Tabloid Media Umat (Nop 2008-skr), wartawan mediaumat.com /mediaumat.news (Des 2008-skr), redaksi pelaksana Newsletter Badan Wakaf Al-Qur'an (Jun 2010-skr) dan redaksi pelaksana Newsletter/Tabloid Kabar Insantama (Sep 2014-skr).

Bungsu dari lima bersaudara putra-putri pasangan suami istri Peltu (Purn TNI-AD) Rd Soendoro (alm) dan Hj Warsiani (alm) tersebut lahir di Bandung, 15 November 1979. Saat ini tinggal di Depok dengan satu istri dan dua anak.

Meraih gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Ilmu Komunikasi Bidang Jurnalistik (2006). Mengikuti Pelatihan *Integrated Editing* di IKAPI DKI Jakarta (2010), Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Menengah (PJMTM) di IAIN Bandung (1999) dan Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar (PJMTD) di Universitas Parahyangan Bandung (1998).

Penulis juga menjadi editor yang mengedit 231 buku terbitan Penerbit Pustaka MediaGuru (Jun 2016-Feb 2019), dosen Jurnalistik di STAI PTDI Jakarta (2010-2015), wartawan majalah Pamong Rider's (Agu 2010-2015),

wartawan majalah Moslempreneur (Agu-Sep 2012), wartawan majalah Percik (Sep-Des 2012), staf sirkulasi Indomedia Group (Jul 2007-Nov 2008), wartawan tabloid Intelijen (Okt 2006-Jun 2007).

Pernah pula mengelola *Dilla's Digital Photo* (2004-2006) di Sumedang, menjadi koresponden media daerah Surat Kabar Priangan Biro Sumedang (Mei-Jun 2006), *job training* pada media daerah Harian Umum Galamedia di Bandung (Nov-Des 2002), pengasuh desk artikel di Surat Kabar Kampus (Suaka) IAIN Bandung (1998).[]

Wajah buruk cermin dibelah. Tak puas membelah, para ulama dan santri pun diberi tulah. Begitulah pepatah baru untuk menggambarkan betapa nistanya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang diabadikan dalam sejarah yang telah membantai sedikitnya 114 ulama, santri dan aparat yang tak bersalah diungkap dalam bab *Ulama dan Santri jadi Syuhada Kekejaman PKI [1948].*

Entah apa yang ada di benak Presiden Soekarno sehingga *keukeuh* memberi hati kepada PKI. Alih-alih dilarang, PKI malah menjadi bagian dari kabinet pemerintahannya sehingga akhirnya meletuslah pemberontakan G30S/PKI. Ceritanya simak pada bab *Diberi Hati, PKI [1965] Berontak Lagi.*

Meski banyak pihak yang menyanggah komunis akan bangkit lagi, tetapi Anggota Komisi III DPR RI Muhammad "Romo" Syafi'i melihat setidaknya (bab) *Hari ini, Terjadi Lima Pengulangan Sejarah Jelang Pemberontakan PKI 1965.*

Sedangkan Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Kostrad ABRI mangajak publik untuk waspada karena (bab) *Bila PKI Hidup Lagi, Tragedi 1948 dan 1965 Terulangi.*

Baca selengkapnya lima bab di atas dan lima bab lainnya dalam buku digital *GEJALA PKI BANGKIT LAGI, BERMUNCULAN PASCA REFORMASI (10 Kisah Ngeri Kebiadaban Kaum Kiri di NKRI)* ini.